



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran Cimaja Jl Raya Cisolak Km 10
Telp (0266) 436407-436408 Cisolak Palabuhanratu-Sukabumi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dalam rangka menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan.

Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Sukabumi.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Renstra Dinas Pertanian dapat disusun dan menjadi pedoman serta acuan bagi pelaksanaan Pembangunan Pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 -2026 .



Sukabumi, Maret 2022

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,

H. TENDY HENDRAYANA, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620711 198503 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian	8
2.2. Sumber Daya PD Dinas Pertanian	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian.....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	33
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD Dinas Pertanian	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	35
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian	41
3.4. Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	48
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	72
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	72
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	82
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	108
BAB VIII PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi	10
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi berdasarkan jenis kelamin Tahun 2020	20
Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi berdasarkan Golongan Tahun 2020	20
Tabel 2.4 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	21
Tabel 2.5 Capaian Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 - 2020	22
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi	28
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi	29
Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan Tupoksi	37
Tabel 3.2 Keterkaitan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat, dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi	44
Tabel 3.3 Telaah Visi, Misi dan Program KDH, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Tupoksi PD	45
Tabel 3.4 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 tanpa Kemiskinan	52
Tabel 3.5 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan	54
Tabel 3.6 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 kota dan Pemukiman berkelanjutan	56
Tabel 3.7 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 15 Ekosistem Darat	58
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	73
Tabel 4.2 Keterkaitan Sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat dengan RPJMD Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026	75
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Dinas pertanian Kabupaten Sukabumi	76
Tabel 5.2 Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan Dengan proyek prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi	87
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	80

Tabel 6.1 Rencana Progran, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi	83
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas pertanian yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	108

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Peta Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026	74
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang tertuang di dalam dokumen perencanaan, diantaranya RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi diselaraskan dengan rencana pembangunan pertanian Nasional dan rencana pembangunan pertanian di Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7 - 6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi adalah Dokumen Perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 yang diselaraskan dengan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 -2026 mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi yang sesuai dengan potensi

sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2021 – 2026.

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani dan kebun, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perkebunan. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi non pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keterkaitan antara renstra Kementerian Pertanian RI, renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Produktivitas hasil pertanian;
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian/hilirisasi produk pertanian;
4. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Pertanian;
5. Mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan akses pasar dan permodalan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berulang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323).
14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembanguna daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
 26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 ;
 28. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.950-Bappeda/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 29. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD Dinas Pertanian ini antara lain adalah:

1.3.1. Maksud

- a. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Pertanian dalam menyusun Renja PD sebagai bahan acuan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- b. Pedoman, acuan dan arahan bagi Dinas Pertanian dan seluruh stake holder dalam menentukan kebijakan, strategi pencapaian, program dan kegiatan di bidang pertanian.
- c. Sebagai pedoman, acuan dan arahan bagi Dinas Pertanian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

1.3.2. Tujuan

- a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
- b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Pertanian dalam mendukung rencana strategis dan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.
- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Dinas Pertanian maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP No. 3 tahun 2007.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pertanian 2021 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang , dasar hukum, mkasud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PD DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI

Bab ini menunjukkan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur PD Dinas Pertanian, sumberdaya PD Dinas Pertanian, Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta peluang pengembangan pelayanan

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan pemasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, meliputi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaahan Renstra Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah serta menjelaskan keterkaitan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan dan renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan sub kegiatan (Output) pagu indikatif

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab VIII PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan perencanaan dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SUKABUMI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Dalam rangka mengejawantahkan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah maka isi bab ini dibatasi hanya untuk menyajikan gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian termasuk Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, maksud dan tujuan pembatasan dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya duplikasi kewenangan antar tingkat pemerintahan dan duplikasi program antara Dinas Pertanian dengan PD lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terjadi reorganisasi dinas dan dibentuk kembali Dinas Pertanian.

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pertanian dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pertanian adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pertanian untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, bidang prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, bidang penyuluhan dan pengembangan usaha; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- e. Pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. Pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian

- g. Pengelolaan sumberdaya genetic pertanian;
- h. Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian;
- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- j. Pengelolaan Kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
- k. Penyelenggaraan dan pengembangan penyuluhan pertanian;
- l. Penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;
- m. Pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;
- o. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas;
- p. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Kepala Bidang Sarana Pertanian, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Sub Koordinator Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian
 - c. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetic Pertanian
4. Kepala Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Prasarana Pertanian
 - c. Sub Koordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian
 - b. Sub Koordinator Kerjasama dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - c. Sub Koordinator Penatausahaan Pertanian
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 2.1.Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian; b. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian; c. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana,program, dan anggaran Dinas Pertanian d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang Sarana pertanian, bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas; e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas; f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat; b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi; c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan; d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas; f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan; g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas; h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas; k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas; l. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas; m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; n. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian; b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian; c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian; d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan; e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan; f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas; g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas; h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan; i. pengelolaan kepegawaian; j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas; k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Kasubag Keuangan, Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi; b. pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
dan Evaluasi	<p>evaluasi;</p> <p>c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;</p> <p>d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan dilingkungan Dinas;</p> <p>e. penyusunan laporan keuangan Dinas;</p> <p>f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;</p> <p>g. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;</p> <p>h. pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program dilingkungan Dinas;</p> <p>i. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;</p> <p>j. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;</p> <p>k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;</p> <p>l. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;</p> <p>m. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;</p> <p>n. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pelayanan publik di lingkungan Dinas;</p> <p>o. pengelolaan data dan informasi dilingkungan Dinas;</p> <p>p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>q. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;</p> <p>r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan</p> <p>s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.</p>
Kepala Bidang Sarana Pertanian	<p>a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sarana Pertanian;</p> <p>b. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengelolaan sarana pertanian, pendampingan dan penyediaan sarana pertanian serta pengelolaan sumberdaya genetic pertanian;</p> <p>c. penyiapan kebijakan teknis di bidang sarana pertanian;</p>

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; e. penyiapan perencanaan kebutuhan dan penyediaan pupuk bersubsidi dan non subsidi; f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan alat mesin pertanian; g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang sarana pertanian; h. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dan bibit di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; i. pengelolaan produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; j. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian; k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Kepala Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian; b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang prasarana pertanian dan penanggulangan bencana pertanian; c. penyiapan kebijakan teknis di bidang prasarana dan penanggulangan bencana pertanian; d. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan air e. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian di lokasi LP2B dan lainnya; f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam, dan dampak perubahan iklim ; g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
Kepala Bidang Penyuluhan dan pengembangan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian; b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian; c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian; d. penyiapan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional Penyuluhan; e. penyiapan bahan rekomendasi ijin usaha di bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Koordinator Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian; b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian; c. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian; d. pelaksanaan pengawasan ketersediaan sarana pertanian; e. pelaksanaan pengawasan pendistribusian sarana pertanian; f. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sarana pertanian; g. melakukan pembinaan dan pengawasan sarana pertanian; h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; i. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
	k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Koordinator Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pendampingan Penggunaan Sarana pertanian ; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pendampingan Penggunaan Sarana pertanian ; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pendampingan Penggunaan Sarana pertanian; d. penyusunan bahan rencana Pendampingan Penggunaan Sarana pertanian ; e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan Pendampingan Penggunaan Sarana pertanian ; f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Sub Koordinator Pengelola Sumber Daya Genetik Pertanian	a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator pengelola sumber daya genetic pertanian; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelola sumber daya genetic; c. penyiapan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan pengelola sumber daya genetic; d. melakukan identifikasi dan inventarisasi sumber daya genetik; e. melakukan penangkaran benih dan bibit tanaman; f. melakukan pengawasan inplementasi pengelolaan sumber daya genetik; g. melakukan pengawasan peredaran sumber daya genetik; h. melakukan perlindungan kearifan local dan pengetahuan tradisional; i. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
	<p>dan</p> <ol style="list-style-type: none"> i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
<p>Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Pertanian</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator pengembangan prasarana pertanian; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan prasarana pertanian; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengembangan prasarana pertanian; d. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi pengembangan prasarana pertanian; e. melakukan pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian; f. pelaksanaan pembinaan pengembangan prasarana pertanian; g. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
<p>Sub Koordinator Pembangunan Prasarana Pertanian</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator pembangunan prasarana pertanian; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembangunan prasarana pertanian; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pembangunan prasarana pertanian; d. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi pembangunan prasarana pertanian; e. melakukan pembangunan prasarana pertanian; f. pelaksanaan pembinaan pengembangan prasarana pertanian; g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
	<p>dan</p> <p>j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.</p>
<p>Sub Koordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p>	<p>a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;</p> <p>b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;</p> <p>c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;</p> <p>d. melakukan identifikasi potensi terjadinya bencana kekeringan, banjir, kebakaran, tanah longsor, serangan OPT dan bencana alam lainnya;</p> <p>e. melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan bencana kekeringan, banjir, kebakaran, tanah longsor, serangan OPT dan bencana alam lainnya;</p> <p>f. pelaksanaan pembinaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;</p> <p>g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;</p> <p>i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;</p> <p>dan</p> <p>j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.</p>
<p>Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian</p>	<p>a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian;</p> <p>b. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Penyuluhan Pertanian;</p> <p>c. Penyusunan bahan kebijakan teknis Penyuluhan Pertanian;</p> <p>d. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi kebutuhan diklat tenaga penyuluh;</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan pengembangan tenaga penyuluh;</p> <p>f. Pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;</p> <p>g. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan</p>

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
	<p>fungsinya;</p> <p>h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;</p> <p>i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan hasil pelaksanaan tugas; dan</p> <p>j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;</p>
Sub Koordinator Kerjasama dan Pemasaran Hasil Pertanian	<p>a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Kerjasama dan Pemasaran Hasil Pertanian;</p> <p>b. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang Kerjasama dan Pemasaran Hasil Pertanian</p> <p>c. Penyusunan bahan kebijakan teknis Kerjasama dan Pemasaran Hasil Pertanian;</p> <p>d. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi kebutuhan Kerjasama dan Pemasaran Hasil Pertanian;</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan Kerjasama dan Pemasaran Hasil Pertanian;</p> <p>f. Pengawasan dan pengendalian Kerjasama dan Pemasaran Hasil Pertanian;</p> <p>g. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;</p> <p>i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan hasil pelaksanaan tugas; dan</p> <p>j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;</p>
Sub Koordinator Penatausahaan Pertanian	<p>a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Penatausahaan Pertanian;</p> <p>b. Pengumpulan dan Pengolahan data di bidang Penatausahaan Pertanian;</p> <p>c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di Penatausahaan Pertanian;</p> <p>d. Melaksanakan Penatausahaan Pertanian;</p> <p>e. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional Penatausahaan Pertanian;</p> <p>f. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan Penatausahaan Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan);</p>

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
	g. Penyiapan bahan rekomendasi ijin usaha bidang pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan); h. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya; j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan hasil pelaksanaan tugas; dan k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
Kepala UPTD	melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu
Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya PD Dinas Pertanian

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon IIB yaitu Kepala Dinas; 1 (satu) orang Eselon IIIA yaitu Sekretaris; 3 (tiga) orang eselon IIIB yaitu Kepala Bidang; 9 (sembilan) Eselon IVA yaitu 1 (satu) orang Kasubbag KPE dan 8 (delapan) orang Kepala UPTD; 10 (sepuluh) orang Sub Koordinator yaitu masing-masing bidang mempunyai 3 (tiga) Sub Koordinator dan 1 (satu) orang Sub Koordinator dibawah Sekretariat serta; 8 (delapan) orang Eselon IVB yaitu Ka TU UPTD.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Pertanian penggerak pembangunan pertanian. Komposisi jumlah pegawai Dinas Pertanian dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan statusnya Pegawai Dinas pertanian berjumlah 141 orang yang terdiri dari 88 orang PNS, sedangkan non PNS sebanyak 53 orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Pertanian berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 115 orang laki-laki atau 81,56 % dan perempuan sebanyak 26 orang atau 18,44 %, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Pertanian berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 8 orang atau 9,09 %, golongan III sebanyak 48 orang atau 54,55 %, golongan II sebanyak 31

orang atau 35,23 %, dan golongan 1 sebanyak 1 orang atau 1,14 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 11 orang atau 7,8 %, Sarjana 45 orang atau 31,91 %, Diploma 13 orang atau 9,22%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 70 orang atau 49,65 % seperti tertera pada Tabel 2.4.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEPALA DINAS	1		1
2.	SEKRETARIAT	7	4	11
3.	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	8	5	13
4.	BIDANG PERKEBUNAN	9	-	9
5.	BIDANG PRASARANA, SARANA PENYULUHAN PERTANIAN	5	3	8
6.	UPTD	19	6	25
7.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	67	28	95
8.	THL	45	7	52
TOTAL		161	53	214

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pertanian Kab.Sukabumi Tahun 2020

Tabel 2.3. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No.	Golongan	PNS	CPNS	Jumlah	%
1	Golongan IV	38		38	23,45
2	Golongan III	84		84	51,85
3	Golongan II	39	1	40	24,70
4	Golongan I	0			0
	JUMLAH	161	1	162	100

Sumber Data Kepegawaian Dinas Pertanian Kab.Sukabumi Tahun 2020

Tabel 2.4. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	
1.	KEPALA DINAS	1						1
2.	SEKRETARIAT	2	3	1		5		11
3.	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	4	5	2		2		13
4.	BIDANG PERKEBUNAN	2	2	1		4		9
5.	BIDANG PRASARANA, SARANA PENYULUHAN PERTANIAN	4	2	1		1		8
6.	UPTD	4	12	1		8		25
7.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	8	51	10	13	12		94
8.	THL		17	5		30		52
TOTAL		25	92	21	13	52	-	214

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pertanian Kab Sukabumi Tahun 2020

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi adalah kantor seluas 36.850 m², yang terdiri kantor dinas utama, 7 (tujuh) kantor UPTD, 47 (empat puluh tujuh) kantor BPP dan 1 (satu) kantor BBI. Kendaraan Dinas sebanyak 48 Unit terdiri dari Roda 4 sebanyak 14 unit dan roda 2 sebanyak 261 unit, Laptop sebanyak 106 unit Personal Komputer (PC) sebanyak 23 unit, Saluran Telepon dan Fax sebanyak 2 Line dan ruang rapat yang memadai dapat menampung 100 Orang,

Dinas Pertanian memiliki 6 kebun dinas, 1 (satu) balai benih pertanian, 1 (satu) balai benih perkebunan dan satu unit usaha yaitu bergerak dibidang pengolahan hasil pangan (beras) dengan nama program PESAT (pemberdayaan

ekonomi masyarakat terpadu) yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Kinerja pelayanan Perangkat Dinas (PD) dapat dilihat dari gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan PD sebagai penjabaran visi, misi Kabupaten Sukabumi dan strategi PD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja Dinas Pertanian bisa diukur indikator kerjanya. Hal ini merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5. Capaian Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	REALISASI LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	PADI					
	1.1. Padi Sawah					
	Luas Tanam (Ha)	157.490	149.474	143.028	119.791	175.657
	Luas Panen (Ha)	150.691	144.949	144.642	142.628	141.814
	Produktivitas (Kw/Ha)	5,8	5,8	5,8	5,6	57,67
	Produksi (Ton GKG)	868.014	841.183	837.016	802.369	817.787
	1.2. Padi Gogo					
	Luas Tanam (Ha)	21.872	22.550	29.059	24.730	33.684
	Luas Panen (Ha)	25.539	21.109	22.181	28.670	31.208
	Produktivitas (Kw/Ha)	3,8	3,8	3,7	0,1	36,38
	Produksi (Ton GKG)	95.911	79.712	82.111	3.235	113.547

NO	URAIAN	REALISASI LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Padi					
	Luas Tanam (Ha)	179.362	172.024	172.087	144.521	209.341
	Luas Panen (Ha)	176.230	166.058	166.823	171.298	173.022
	Produktivitas (Kw/Ha)	5,5	5,5	5,5	0,0	53,83
	Produksi (Ton GKG)	963.925	920.894	919.127	3.235	931.334
II	PALAWIJA					
	2.1. Jagung					
	Luas Tanam (Ha)	19.595	12.409	13.267	31.888	21.633
	Luas Panen Tua (Ha)	17.484	9.919	15.412	24.517	31.694
	Produktivitas (Kw/Ha)	6,4	6,5	6,4	0,1	55,49
	Produksi (Ton Pipilan Kering)	112.603	64.714	98.825	3.235	175.864
	2.2. Kedelai					
	Luas Tanam (Ha)	4.084	2.912	32.990	8.850	17.429
	Luas Panen (Ha)	4.030	2.524	28.586	5.863	23.664
	Produktivitas (Kw/Ha)	1,7	1,7	1,2	0,6	12,04
	Produksi (Ton Biji Kering)	6.905	4.228	35.092	3.235	28.496
	2.3. Kacang Tanah					
	Luas Tanam (Ha)	2.476	2.217	2.250	1.762	4.754
	Luas Panen (Ha)	3.229	1.992	2.471	1.988	3.953
	Produktivitas (Kw/Ha)	1,6	1,6	1,6	1,6	16,48

NO	URAIAN	REALISASI LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Produksi (Ton Biji Kering)	5.233	3.235	4.016	3.235	6.514
	2.4. Kacang Hijau					
	Luas Tanam (Ha)	416	8	70	321	334
	Luas Panen (Ha)	428	8	12	58	676
	Produktivitas (Kw/Ha)	1,6	1,6	1,6	1,1	12,33
	Produksi (Ton Biji Kering)	682	13	19	66	833
	2.5. Ubi Kayu					
	Luas Tanam (Ha)	5.472	5.199	4.388	3.510	8.976
	Luas Panen (Ha)	6.597	6.612	4.727	4.554	4.923
	Produktivitas (Kw/Ha)	20,5	20,8	20,8	30,2	241,96
	Produksi (Ton Ubi Basah)	135.493	137.385	98.552	137.385	119.117
	2.6. Ubi Jalar					
	Luas Tanam (Ha)	687	865	645	-	978
	Luas Panen (Ha)	669	839	770	-	895
	Produktivitas (Kw/Ha)	16,0	15,9	15,9	-	157,98
	Produksi (Ton Ubi Basah)	10.712	13.339	12.255	3.235	14.140
	Jumlah Palawija					
	Luas Tanam (Ha)	32.730	23.610	53.610	46.331	54.104
	Luas Panen (Ha)	32.437	21.894	51.978	36.980	65.805
	Produktivitas (Kw/Ha)	47,8	48,1	47,5	33,6	496,28
	Produksi (Ton Ubi Basah)	271.628	222.914	248.759	150.391	344.964

NO	URAIAN	REALISASI LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
III	SAYURAN					
	3.1. Bawang Merah					
	Luas Tanam (Ha)	80	74	70	72	46
	Luas Panen (Ha)	74	117	92	62	68
	Produktivitas (Kw/Ha)	123	109	101,96	57,26	89,38
	Produksi (Ton)	907,8	1.274	938	355	608
	3.2. Kentang					
	Luas Tanam (Ha)	0	0	5	8	-
	Luas Panen (Ha)	0	8	3	7	2
	Produktivitas (Kw/Ha)	0	70	75	98,57	100,00
	Produksi (Ton)	0	56	22,5	69	20
	3.3. Kubis					
	Luas Tanam (Ha)	200	65	374	369	539
	Luas Panen (Ha)	195	279	344	378	554
	Produktivitas (Kw/Ha)	270	231	299,49	266,06	171,06
	Produksi (Ton)	5.261	6.353,4	10.302	10.057	9.477
	3.4. Cabe Besar					
	Luas Tanam (Ha)	1.000	517	1.880	1.146	1.123
	Luas Panen (Ha)	1.106	1.113	1.557	1.635	1.260
	Produktivitas (Kw/Ha)	140	109	115,6	129,80	122,12
	Produksi (Ton)	15.496,6	12.181,6	17.946	21.223	15.386
	3.5. Tomat					
	Luas Tanam (Ha)	661	187	674	599	704
	Luas Panen (Ha)	698	600	740	638	716
	Produktivitas (Kw/Ha)	283	286	261,84	251,04	205,18
	Produksi (Ton)	19.748,7	17.184,6	19.376,3	16.016,3	14.444,6

NO	URAIAN	REALISASI LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
	3.6. Bawang Daun					
	Luas Tanam (Ha)	394	84	561	542	634
	Luas Panen (Ha)	397	508	562	535	638
	Produktivitas (Kw/Ha)	90	91	96,72	96,71	89,82
	Produksi (Ton)	3.575	4.611,8	5.436	5.174	5.731
	3.7. Petsai					
	Luas Tanam (Ha)	1.397	185	1.990	1.682	2.078
	Luas Panen (Ha)	1.382	1.630	1.927	1.759	2.066
	Produktivitas (Kw/Ha)	106	113	107,10	105,36	113,94
	Produksi (Ton)	14.620,5	18.404,1	20.638,9	18.332	23.540
	3.8. Kacang Panjang					
	Luas Tanam (Ha)	926	257	914	656	846
	Luas Panen (Ha)	909	945	974	729	818
	Produktivitas (Kw/Ha)	157	163	149,56	157,09	150,70
	Produksi (Ton)	14.876,4	12.423,1	14.567	11.452	12.327
	3.9. Terung					
	Luas Tanam (Ha)	490	136	558	386	498
	Luas Panen (Ha)	478	455	592	444	470
	Produktivitas (Kw/Ha)	185	202	170,25	176,06	174,51
	Produksi (Ton)	8.840	12.375,9	10.078,6	7.816,9	8.202
	3.10. Ketimun					
	Luas Tanam (Ha)	979	223	1.046	815	1.059
	Luas Panen (Ha)	1.028	902	1.056	874	
	Produktivitas (Kw/Ha)	189	182	174,42	185,77	184,77
	Produksi (Ton)	19.410,2	16.406,7	18.118	16.236	19.659
	3.11. Kangkung					
	Luas Tanam (Ha)	38	11	56	47	20
	Luas Panen (Ha)	37	35	52	51	21
	Produktivitas (Kw/Ha)	116	106	120,13	140,84	112,14
	Produksi (Ton)	431	371	624,7	718,3	235,5

NO	URAIAN	REALISASI LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Sayuran					
	Luas Tanam (Ha)	6.165	1.739	8.128	6.322	7.547
	Luas Panen (Ha)	6.304	6.592	7.899	7.112	6.613
	Produktivitas (Kw/Ha)	1.659	1.662	1.672,07	1.664,56	1.558,62
	Produksi (Ton)	111.337,4	101.642,2	126.693	111.466	115.281
IV	BUAH-BUAHAN					
	Produksi (Kuintal)					
	1. Alpukat	1.608	3.113	3.113,1	2.342,4	3.955,7
	2. Mangga	6.319	9.939	9.939	9.507,6	8.975,5
	3. Rambutan	1.973	1.251	1.251,2	3.235,5	1.623,9
	4. Durian	4.707	6.951	6.950,9	4.959,9	2.991,6
	5. Duku	156	68	68,3	438,6	609
	6. Jeruk besar	193	235	0	321,6	299,8
	7. Jambu biji	5.146	3.236	3.235,9	2.513,3	8.155,9
	8. Sawo	1.051	973	972,9	1.087,3	1.338,8
	9. Pepaya	22.552	19.092	19.091,5	20.722,7	10.996,6
	10. Nenas	134	169	168,5	127,3	99,5
	11. Pisang	117.421	139.779,5	117.421,2	115.340,6	105.454,3
	12. Salak	81,5	88	88	67,4	321,7
	13. Belimbing	249	284	283,8	294,8	309,3
	14. Nangka	3.143	4.496	4.496,4	3.262,7	3.709,7
	15. Manggis	2.350	1.919	1.918,7	4.154,5	1.871,1
	16. Sukun	313	577	576,8	943,5	1.028,7
	17. Sirsak	715	744	743,8	586,8	1.084,9
	Jumlah Buah-buahan	168.111,5	192.914,5	181.580,8	169.904,5	152.826,0

Berdasarkan capaian sasaran/target Renstra Dinas Pertanian pada periode 2016 sampai 2020 diajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Persentase peningkatan produksi										3,29	0,69	0,46	3,42	11,94	164,5	34,5	23	171	280
2	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor agribisnis										0,66	3,73	0,17	2,89		0	33	186	8,5	124,26

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pertanian pada periode 2016 sampai 2020 diajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Pegawai	5,213,442,112	7,123,817,097	8,474,244,941	23,350,017,507	22,385,906,331	5,120,848,986	5,533,112,081	8,364,509,870	23,077,865,763	22,307,591,940	98,22	77,67	98,71	98,83	99,65	13,309,485,597.60	12,880,785,728
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	792,780,125	1,021,047,178	2,206,492,178	2,694,680,000	2,187,646,000	782,788,263	1,008,479,348	2,132,246,265	2,536,334,943	2,157,790,075	98,74	98,77	96,64	94,12	98,64	1,780,529,096.20	1,723,527,779
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	707,230,000	839,175,000	930,517,500	1,729,100,000	799,767,250	699,127,850	831,833,200	924,817,852	1,376,276,921	792,746,500	98,85	99,13	99,39	79,59	99,12	1,001,157,950.00	924,960,465
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	89,830,000	50,275,000	18,273,275	250,000,000	-	89,830,000	50,275,000	17,673,275	249,300,000	-	100,00	100,00	96,72	99,72	0	81,675,655.00	81,415,655
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	18,273,275	-	25,000,000	-	-	18,260,000	-	24,950,000	-	0	99,93	0	99,80	0	8,654,655.00	8,642,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,000,000	130,382,350	71,562,350	390,000,000	155,308,400	25,000,000	130,382,350	71,562,350	387,860,000	155,308,400	100,00	100,00	96,72	99,45	100,00	154,450,620.00	154,022,620
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	29,595,097,329	36,264,259,385	38,466,840,840	48,029,424,645	-	29,215,845,862	31,682,008,910	36,442,247,751	46,774,477,113	-	98,72	87,36	94,74	97,39	0	30,471,124,439.80	28,822,915,927
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	689,230,000	-	-	-	-	685,918,300	-	-	-	-	99,52	0	0	0	0	137,846,000.00	137,183,660
Program Peningkatan Produksi Pertanian	3,369,640,125	765,000,000	1,723,640,000	3,160,000,000	19,036,627,500	3,344,846,751	753,544,000	1,702,370,500	2,906,670,610	13,060,565,525	99,26	98,50	98,77	91,98	68,61	5,610,981,525.00	4,353,599,477
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	3,126,515,463	2,215,231,000	9,594,350,000	1,397,765,500	-	2,592,590,463	1,970,436,500	9,021,188,079	1,397,665,500	0	82,92	88,95	94,03	99,99	3,266,772,392.60	2,996,376,108
Jumlah	40,482,249,691	49,338,744,748	54,106,802,084	89,222,572,152	45,963,020,981	39,964,206,012	42,600,485,352	51,625,864,363	86,354,923,429	39,871,667,940	98.72	86.34	95.41	96.79	86.75		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Tantangan Kementerian Pertanian adalah pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Orientasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya mengejar kepada target pertumbuhan, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan).

Sejalan dengan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia pertanian.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sarana prasarana pertanian.

4. Mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan akses pasar dan permodalan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal dan eksternal yang berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi maka terdapat tantangan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi antara lain :

- a. Luas wilayah, terutama wilayah yang memiliki keaneka ragaman komoditas unggulan berpotensi sebagai basis pengembangan agribisnis, karena sangat sesuai untuk tujuan pembangunan sektor pertanian yang berorientasi ekspor serta memiliki deposit kandungan mineral yang prospektif, sehingga membutuhkan SDM daerah yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan daerah;
- b. Potensi budaya Sukabumi dan sejarah lokal yang kaya dengan muatan dan nuansa adat istiadat serta tradisi dan kearifan lokal yang haus akan peningkatan ilmu, pengetahuan dan ketaqwaan;
- c. Jumlah penduduk yang besar yang kalau dibina dan dididik secara terfokus akan melahirkan jajaran SDM terdidik dan terlatih yang mampu menjadi faktor penggerak utama pembangunan daerah;
- d. Potensi ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pertambangan) daerah di sekitarnya, yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan, sehingga dapat dikelola sebagai basis pengembangan Pertanian ;
- e. Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai salah pusat pengembangan Pertanian di pantai selatan Provinsi Jawa Barat;
- f. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemda dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengembangkan bidang Pertanian;

Faktor Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian antara lain terdiri dari:

- a. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Sukabumi, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta rangkaian aturan perundangan lain telah menguatkan

semangat dan keinginan untuk membangun *good governance*, termasuk di bidang Pertanian;

- b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi dunia usaha dan sektor swasta untuk mengembangkan kegiatan Pertanian yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026.

Untuk dapat melaksanakan amanat RPJMD Kabupaten Sukabumi dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya di Tahap Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan pertanian adalah “**Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat melalui pariwisata sebagai lokomotif didukung pembangunan sector agribisnis dan ekonomi yang berkelanjutan**”.

Dalam mewujudkan misi tersebut maka dinas pertanian dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan dan menjawab isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian berkaitan dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah petani;
- b. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
- c. Rendahnya regenerasi SDM di sector pertanian;
- d. Pembangunan infrastruktur yang belum optimal;
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian;
- f. Data pertanian yang belum rapi;
- g. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian yaitu hanya sebesar 0,3 ha per rumah tangga petani (sensus pertanian, 2013);
- h. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kurangnya memproteksi lahan pertanian produktif (LP2B).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal, terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. **Unsur Kekuatan**, antara lain terdiri dari:

- a. Luas wilayah, terutama wilayah yang memiliki keaneka ragaman komoditas unggulan berpotensi sebagai basis pengembangan agribisnis, karena sangat sesuai untuk tujuan pembangunan sektor pertanian yang

berorientasi ekspor serta memiliki deposit kandungan mineral yang prospektif, sehingga membutuhkan SDM daerah yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan daerah;

- b. Potensi budaya Sukabumi dan sejarah lokal yang kaya dengan muatan dan nuansa adat istiadat serta tradisi dan kearifan lokal yang haus akan peningkatan ilmu, pengetahuan dan ketaqwaan;
- c. Jumlah penduduk yang besar yang kalau dibina dan dididik secara terfokus akan melahirkan jajaran SDM terdidik dan terlatih yang mampu menjadi faktor penggerak utama pembangunan daerah;
- d. Potensi ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pertambangan) daerah di sekitarnya, yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan, sehingga dapat dikelola sebagai basis pengembangan Pertanian ;
- e. Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai salah pusat pengembangan Pertanian di pantai selatan Provinsi Jawa Barat;
- f. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemda dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengembangkan bidang Pertanian;

Adapun **Unsur Kelemahan**, antara lain terdiri dari:

- a. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian, yang membutuhkan penyegaran dan penyempurnaan yang bersifat terus-menerus, sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman;
- b. Kualifikasi dan kompetensi SDM Dinas Pertanian, baik tenaga perencanaan program, perencanaan bidang kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, perencanaan anggaran maupun kualifikasi tenaga pertanian yang membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan;
- c. Tugas pokok dan fungsi masing-masing yang masih perlu disesuaikan dengan bidang kewenangan dalam rangka sinkronisasi tugas pokok dengan program dan kegiatan turunannya;
- d. Tingginya pengaruh model perencanaan proyek di kalangan para pejabat dan staff sehingga masih kesulitan dalam menyusun rencana program berbasis kinerja secara terukur;

Sama dengan analisis atas lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor peluang dan

faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya, atau paling tidak, kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman adalah lebih terbatas.

I. Faktor Peluang, antara lain terdiri dari:

- a. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Sukabumi, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta rangkaian aturan perundangan lain telah menguatkan semangat dan keinginan untuk membangun *good governance*, termasuk di bidang Pertanian;
- b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi dunia usaha dan sektor swasta untuk mengembangkan kegiatan Pertanian yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

II. Faktor Ancaman, antara lain terdiri dari:

- a. Adanya berbagai sub-wilayah yang belum memiliki infrastruktur sosial ekonomi dan fisik yang kurang memadai, terutama jaringan jalan raya, infrastruktur fasilitas air bersih, dan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan Pertanian;
- b. Belum meratanya sebaran geografis pusat-pusat layanan Pertanian antar kecamatan, sehingga angka partisipasi murni dan kasar Pertanian dasar dan menengah belum merata antar kecamatan dan antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan;
- c. Masih tersisnya tradisi dan pemikiran lama di kalangan sejumlah penduduk sehingga belum berminat untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah karena diparlakukan sebagai tenaga kerja untuk mencari nafkah keluarga;
- c. Tingginya angka kerusakan fasilitas infrastruktur fisik sehingga menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 merupakan manifestasi cita-cita dari mimpi kepala daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi. Visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dijadikan petunjuk arah bagi pembangunan daerah sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Visi pembangunan jangka

menengah daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi di atas memiliki makna sebagai berikut:

a. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.

b. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing,
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional, dan akuntabel.

Penyesuaian rumusan visi, misi dan arah kebijakan teknis bidang pertanian dengan RPJM Daerah adalah untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kabupaten dengan perencanaan mikro bidang kewenangan pertanian. Visi, misi dan arah kebijakan strategis pasangan Bupati dan Wakil Bupati

menjadi dasar dan acuan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dalam menyusun renstra sebagai dokumen perencanaan teknis.

Dari keempat misi tersebut yang berkaitan langsung dengan Dinas Pertanian terutama adalah Misi yang kedua yaitu **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.**

SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah 2021-2026 yaitu :

1. SDM yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan
2. Ekonomi yaitu pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan pengembangan Industri pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan
3. Sosial yaitu penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial
4. Infrastruktur yaitu peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
5. Pemerintahan yaitu peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan public.

Tabel 3.1 Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan Tupoksi PD

No	Visi/Misi/ Program Kerja	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	Visi: “ Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat	Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pertanian untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis	1. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah petani; 2. Rendahnya nilai tukar	Faktor penghambat: 1. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian, yang membutuhkan penyegaran dan penyempurnaan yang

No	Visi/Misi/ Program Kerja	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>Sejahtera Lahir Batin</p> <p>Misi: “Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan”.</p> <p>Program Kerja: Digitalisasi Pertanian, Peternakan, kelautan dan perikanan (4 sektor)</p> <p>Pengembangan Infrastruktur Pertanian di Kawasan LP2B</p>	<p>di bidang Pertanian;</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, bidang prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, bidang penyuluhan dan pengembangan usaha; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;</p> <p>5. Pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas;</p> <p>6. Pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian</p> <p>7. Pengelolaan sumberdaya genetic pertanian;</p> <p>8. Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian;</p> <p>9. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;</p> <p>10. Pengelolaan Kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;</p> <p>11. Penyelenggaraan dan pengembangan penyuluhan pertanian;</p> <p>12. Penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;</p> <p>13. Pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;</p> <p>14. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin</p>	<p>petani (NTP)</p> <p>3. Rendahnya regenerasi SDM di sector pertanian;</p> <p>4. Pembangunan infrastruktur yang belum optimal;</p> <p>5. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian;</p> <p>6. Data pertanian yang belum rapi;</p> <p>7. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian yaitu hanya sebesar 0,3 ha per rumah tangga petani (sensus pertanian, 2013);</p> <p>8. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kurangnya memproteksi lahan pertanian LP2B</p>	<p>bersifat terus-menerus, sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman;</p> <p>2. Kualifikasi dan kompetensi SDM Dinas Pertanian, baik tenaga perencanaan program, perencanaan bidang kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, perencanaan anggaran maupun kualifikasi tenaga pertanian yang membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan;</p> <p>3. Tugas pokok dan fungsi masing-masing yang masih perlu disesuaikan dengan bidang kewenangan dalam rangka sinkronisasi tugas pokok dengan program dan kegiatan turunannya;</p> <p>4. Tingginya pengaruh model perencanaan proyek di kalangan para pejabat dan staff sehingga masih kesulitan dalam menyusun rencana program berbasis kinerja secara terukur.</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <p>1. Luas wilayah, terutama wilayah yang memiliki keaneka ragaman</p>

No	Visi/Misi/ Program Kerja	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
		usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;		<p>komoditas unggulan berpotensi sebagai basis pengembangan agribisnis, karena sangat sesuai untuk tujuan pembangunan sektor pertanian yang berorientasi ekspor serta memiliki deposit kandungan mineral yang prospektif, sehingga membutuhkan SDM daerah yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan daerah;</p> <p>2.Potensi budaya Sukabumi dan sejarah lokal yang kaya dengan muatan dan nuansa adat istiadat serta tradisi dan kearifan lokal yang haus akan peningkatan ilmu, pengetahuan dan ketaqwaan;</p> <p>3.Jumlah penduduk yang besar yang kalau dibina dan dididik secara terfokus akan melahirkan jajaran SDM terdidik dan terlatih yang mampu menjadi faktor penggerak utama pembangunan daerah;</p> <p>4.Potensi ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan,</p>

No	Visi/Misi/ Program Kerja	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
				<p>perikanan, industri kecil dan pertambangan) daerah di sekitarnya, yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan ;</p> <p>5.Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai salah pusat pengembangan Pertanian di pantai selatan Provinsi Jawa Barat;</p> <p>6.Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemda dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengembangkan bidang Pertanian;</p>

Dari table diatas terlihat jelas untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati 2021-2026 telah dapat dirumuskan secara sistematis, sehingga dinas pertanian dalam mengambil peran sesuai tugasnya dalam upaya mensukseskan visi dan misi tersebut dengan melihat factor penghambat dan factor pendorong yang menjadi bahan dalam menyusun rencana strategis dan arah kebijakannya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian RI telah menetapkan Rencana Strategis periode tahun 2020-2024 sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7 - 6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024.

Visi Kementerian Pertanian adalah: “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja :

1. peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri

SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja :

2. pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
 3. persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan
- SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja :
4. persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
 5. persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan
- SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja :
6. persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
 7. teknologi yang diterapkan oleh pertanian
- SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja :
8. indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
 9. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
- SS6. Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja :
10. persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
 11. persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
 12. persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
- SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :
13. persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
 14. persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
- SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja :
15. nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
- SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja :

16. nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Dari telaahan renstra Kementerian Pertanian, bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari target-target yang tertuang dalam renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, Untuk melihat keterkaitan dan dukungan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada table 3.4

Tabel 3.2 Keterkaitan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat, dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Inklusif	S9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata
		S18	Meningkatnya peran industry dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sector agribisnis dan pariwisata
				S7	Menurunnya tingkat Pengangguran
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S14	Meningkatnya kualitas Infrastruktur
				S16	Meningkatnya kinerja layanan Transportasi
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sector pertanian, kelautan, dan perikanan
	pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi,				

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
	Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera				
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	S5	Menurunnya tingkat Kemiskinan
		S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
S4	Terkendalinya Pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan Anak	S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
S5	Meningkatnya perlindungan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S5	Menurunnya tingkat kemiskinan

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Jawa Barat 2018-2023, dan sasaran pembangunan RPJMN tahun 2020-2024.

Tabel. 3.3 Telaah Visi, Misi, Program KDH, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Tupoksi PD

No	Visi/Misi/Program Kerja	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>Visi: “ Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”</p> <p>Misi: “Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis</p>	<p>Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pertanian untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian; 2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian; 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah petani; 2. Rendahnya nilai tukar petani (NTP) 3. Rendahnya regenerasi SDM di sector pertanian; 4. Pembangunan 	<p>Faktor penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian, yang membutuhkan penyegaran dan penyempurnaan yang bersifat terus-menerus, sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman;

No	Visi/Misi/ Program Kerja	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan”.</p> <p>Program Kerja: Digitalisasi Pertanian, Peternakan, kelautan dan perikanan (4 sektor)</p> <p>Pengembangan Infrastruktur Pertanian di Kawasan LP2B</p>	<p>di bidang kesekretariatan, bidang sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, bidang prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, bidang penyuluhan dan pengembangan usaha; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;</p> <p>5. Pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas;</p> <p>6. Pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian</p> <p>7. Pengelolaan sumberdaya genetic pertanian;</p> <p>8. Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian;</p> <p>9. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;</p> <p>10. Pengelolaan Kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;</p> <p>11. Penyelenggaraan dan pengembangan penyuluhan pertanian;</p> <p>12. Penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;</p> <p>13. Pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;</p> <p>14. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;</p>	<p>infrastruktur yang belum optimal;</p> <p>5. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian;</p> <p>6. Data pertanian yang belum rapi;</p> <p>7. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian yaitu hanya sebesar 0,3 ha per rumah tangga petani (sensus pertanian, 2013);</p> <p>8. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kurangnya memproteksi lahan pertanian LP2B</p>	<p>2. Kualifikasi dan kompetensi SDM Dinas Pertanian, baik tenaga perencanaan program, perencanaan bidang kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, perencanaan anggaran maupun kualifikasi tenaga pertanian yang membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan;</p> <p>3. Tugas pokok dan fungsi masing-masing yang masih perlu disesuaikan dengan bidang kewenangan dalam rangka sinkronisasi tugas pokok dengan program dan kegiatan turunannya;</p> <p>4. Tingginya pengaruh model perencanaan proyek di kalangan para pejabat dan staff sehingga masih kesulitan dalam menyusun rencana program berbasis kinerja secara terukur.</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <p>1. Luas wilayah, terutama wilayah yang memiliki keaneka ragaman komoditas unggulan berpotensi sebagai basis pengembangan agribisnis, karena sangat sesuai untuk tujuan pembangunan sektor pertanian yang berorientasi ekspor serta memiliki deposit kandungan mineral yang prospektif, sehingga membutuhkan SDM daerah yang mampu</p>

No	Visi/Misi/ Program Kerja	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
				<p>menjawab tantangan kebutuhan pembangunan daerah;</p> <p>2.Potensi budaya Sukabumi dan sejarah lokal yang kaya dengan muatan dan nuansa adat istiadat serta tradisi dan kearifan lokal yang haus akan peningkatan ilmu, pengetahuan dan ketaqwaan;</p> <p>3.Jumlah penduduk yang besar yang kalau dibina dan dididik secara terfokus akan melahirkan jajaran SDM terdidik dan terlatih yang mampu menjadi faktor penggerak utama pembangunan daerah;</p> <p>4.Potensi ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pertambangan) daerah di sekitarnya, yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan ;</p> <p>7.Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai salah pusat pengembangan Pertanian di pantai selatan Provinsi Jawa Barat;</p> <p>8.Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemda</p>

No	Visi/Misi/ Program Kerja	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
				dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengembangkan bidang Pertanian;

Dengan telaah diatas tentang visi, misi, program KDH, tupoksi PD, permasalahan juga factor penghambat dan pendorong yang akan mendukung kinerja K/L Pertanian maupun dinas provinsi Jawa Barat. Untuk itu dinas pertanian dalam menjalankan tupoksinya akan sangat terukur dan terfasilitasi dengan telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah 2021-2026 yang merupakan sebagai peluang dan kekuatan yaitu :

1. SDM yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan
2. Ekonomi yaitu pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan pengembangan Industri pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan
3. Sosial yaitu penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial
4. Infrastruktur yaitu peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
5. Pemerintahan yaitu peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan public.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa barat

Memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan ketersediaan teknologi maju di Jawa Barat yang sangat menunjang dalam pembangunan pertanian, serta mengacu pada Visi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi Termaju di indonesia Tahun 2025”, serta Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera untuk Semua”, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

menetapkan visi yaitu : “Terwujudnya Pertanian dan Hortikultura Jawa Barat yang Maju dan Tangguh”.

Untuk dapat mewujudkan visi dengan cara mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia pertanian.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sarana prasarana pertanian.
4. Mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan akses pasar dan permodalan

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi 2012-2032 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 tahun 2012, untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukabumi, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah. Didalam RTRW terdapat Kawasan budi daya yang merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Selain kawasan budidaya, didalam RTRW terdapat Kawasan agropolitan yang merupakan kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai siste produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agribisnis.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri menuju kabupaten yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain yang terkait dengan bidang pertanian adalah kebijakan pengembangan sentra agribisnis berorientasi agropolitan .

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah Pengembangan sentra agribisnis berorientasi agropolitan, maka ditetapkan strategi meliputi :

- a. Meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran.
- b. Mengembangkan kawasan agribisnis berorientasi agropolitan
- c. Mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B).

Rencana Kawasan Budidaya yang peruntukannya untuk pertanian terdiri dari :

- a. Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah seluas kurang lebih 47.848 hektar berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B) seluas 55.000 Ha yang berada di seluruh kecamatan.
- b. Kawasan peruntukan hortikultura seluas kurang lebih 5.815 hektar meliputi :
 - Tanaman sayuran seluas 5.000 hektar tersebar di 47 kecamatan.
 - Tanaman buah-buahan seluas kurang lebih 770 hektar tersebar di 47 kecamatan terdiri dari :
 - a. Pengembangan manggis seluas 150 hektar di kecamatan Cicantayan dan Cikembar
 - b. Pengembangan sirsak ratu seluas 50 hektar di kecamatan Bantargadung dan Palabuhanratu.
 - c. Pengembangan pepaya seluas 50 hektar di kecamatan Kalapanunggal, Parakansalak, Kabandungan, Cidahu dan Cicurug.
 - d. Pengembangan rambutan seluas 50 hektar di kecamatan Warungkiara.
 - e. Pengembangan durian seluas 100 hektar di kecamatan Cikakak dan Cikidang
 - f. Pengembangan pisang ambon putih seluas 50 hektar di kecamatan Sukabumi, Cibadak, Caringin dan Cicurug.
 - g. Pengembangan pisang tanduk seluas 200 hektar di kecamatan Cisolok, Palabuhanratu, Bantargadung, Simpenan, Ciemas, Surade dan Cidolog.
 - h. Pengembangan semangka dan melon seluas 20 hektar di kecamatan Ciemas, Ciacap dan Surade.

- i. Pengembangan rempah-rempahan dan biofarmaka seluas kurang lebih 100 hektar di kecamatan Ciemas, Waluran, Lengkong, Cibitung, Cikidang, Cicurug, Nagrak dan Ciambar.
- j. Pengembangan tanaman hias seluas 45 hektar di kecamatan Sukabumi, Cicurug dan Sukaraja.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi, serta menjamin program/arahan kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup.

KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut:

- TPB 1 : Tanpa kemiskinan
- TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
- TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan
- TPB 11 : Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
- TPB 15 : Ekosistem darat

Berikut ini disajikan skenario terhadap 5 (lima) TPB prioritas KLHS berupa rekomendasi arah kebijakan, arahan program, dan para pihak yang dapat berkontribusi untuk mencapai *outcome* yang ditentukan.

TPB 1 : Tanpa kemiskinan

Terdapat dua *outcome* yang berkaitan dengan TPB 1, yang pertama yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. *Outcome* kedua yaitu meningkatnya kapasitas prasarana air baku dan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dan sanitasi layak. Pada

Tabel 3.4 disajikan arahan kebijakan, arahan program, dan pihak yang dapat terlibat untuk mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan.

Tabel 3.4 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan program	Para pihak
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Pengentasan Kemiskinan Akibat adanya pandemic	Program perlindungan dan jaminan sosial	• Dinas Sosial
		Program rehabilitasi sosial	• Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
		Program pemberdayaan sosial	Menengah • Dinas Pertanian
		Program perencanaan tenaga Kerja	• Dinas Pekerjaan Umum Dinas Lingkungan • Hidup
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	• Dinas Penanaman Modal dan
		Program penempatan tenaga kerja	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program pengendalian Penduduk	• Dinas Perindustrian dan ESDM • Dinas Ketahanan dan Tata Ruang
		Program pembinaan keluarga berencana	• Dinas Ketahanan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan program	Para pihak
			Pangan
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas Tenaga Kerja • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Latihan Kerja
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Prov. Jawa Barat • Pemerintah kecamatan
		Program pengembangan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha • LSM bidang pemberdayaan masyarakat
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan mitra Bidang pemberdayaan masyarakat
		Program penyuluhan pertanian	
		Program stabilisasi harga barang	

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan program	Para pihak
		kebutuhan pokok dan barang penting	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	

TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan

Outcome yang diharapkan untuk mewujudkan TPB 10 yaitu berkurangnya kesenjangan masyarakat dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pada Tabel 3.5 disajikan Arahan kebijakan, arahan program, dan aktor yang dapat terlibat dalam mewujudkan TPB 10.

Tabel 3.5 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10 berkurangnya kesenjangan

<i>Outcomes</i>	Arahan Kebijakan	Arahan program	Para pihak
Berkurangnya Kesenjangan Dengan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pengentasan Kemiskinan Akibat Adanya Pandemic	Program perlindungan dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Pertanian • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindustrian dan ESDM • Dinas Ketahanan dan Tata Ruang • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Peternakan • Dinas Tenaga Kerja
		Program rehabilitasi sosial	
		Program pemberdayaan sosial	
		Program perencanaan tenaga Kerja	
		Program pelatihan	
		kerja dan produktivitas tenaga kerja	
		Program penempatan tenaga kerja	
		Program pengendalian Penduduk	
		Program pembinaan keluarga berencana	
		Program pemberdayaan dan	

<i>Outcomes</i>	Arahan Kebijakan	Arahan program	Para pihak
		peningkatan keluarga sejahtera	
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Pariwisata • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Balai Latihan Kerja • Badan Perencanaan Pengembangan Daerah • Prov. Jawa Barat • Pemerintah Kecamatan • Pemerintah desa • Pelaku usaha • LSM bidang pemberdayaan masyarakat • Organisasi dan mitra Bidang pemberdayaan masyarakat
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
		Program pengembangan UMKM	
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
		Program penyuluhan pertanian	
		Program stabilisasi harga barang	
		kebutuhan pokok dan barang penting	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

TPB 11 : Kota dan pemukiman berkelanjutan

Terdapat dua *outcome* yang berkaitan dengan TPB 11, yang pertama yaitu terwujudnya ketahanan terhadap bencana, dan kedua yaitu terwujudnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien. Pada Tabel 3.6 disajikan arahan kebijakan, arahan program, dan pihak yang dapat terlibat untuk mewujudkan TPB 11 kota dan pemukiman berkelanjutan.

Tabel 3.6 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 kota dan pemukiman berkelanjutan

<i>Outcomes</i>	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
Terwujudnya ketahanan (<i>resilience</i>) Terhadap bencana, sosial, dan ekonomi di Kab. Sukabumi	Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • Dinas Kesehatan • BPBD • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Sosial • Dinas Perpustakaan dan Kerasipan • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Pemadam Kebakaran • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha • Akademisi • LSM bidang penanganan bencana
		Program perencanaan lingkungan hidup	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Program penataan bangunan Gedung	
		Program Penanggulangan Bencana	
		Program Penanganan Bencana	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non	

<i>Outcomes</i>	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		Kebakaran	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
	Mengembangkan sarana dan prasarana yang tahan bencana	Program Penyelenggaraan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • Dinas Kesehatan • BPBD • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Program Pengembangan perumahan	
	sebagai mitra Pengelolaan	Program pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Akademisi • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
	Peningkatan Cakupan pelayanan dan kualitas system Pengelolaan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	
	Pengembangan	Program	
	kelambagaan, peraturan dan perundang-Undangan	pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	
	Pengembangan alternatif sumber Pembiayaan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan	

<i>Outcomes</i>	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		persampahan regional	
		Program pengelolaan persampahan	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

TPB 15 : Ekosistem darat

Outcome pada TPB 15 yaitu terlaksananya perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Arahan kebijakan, arahan program, dan aktor yang dapat terlibat dalam mewujudkan TPB 15 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 15 ekosistem darat

<i>Outcomes</i>	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
Terwujudnya ketahanan (<i>resilience</i>) Terhadap bencana, sosial, dan ekonomi di Kab. Sukabumi	Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program perencanaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • Dinas Kesehatan • BPBD • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman • Dinas Lingkungan Hidup
		Program penataan bangunan Gedung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas Perpustakaan dan Kerasipan • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Pemadam Kebakaran • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha

<i>Outcomes</i>	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Akademisi • LSM bidang penanganan bencana • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
		Program Penanggulangan Bencana	
		Program Penanganan Bencana	
	Mengembangkan sarana dan prasarana yang tahan bencana	Program Penyelenggaraan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • Dinas Kesehatan • BPBD • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas
		Program Pengembangan Perumahan	
		Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	
		Program Penataan Desa	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Perpustakaan dan Kerasipan
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemadam Kebakaran • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha • Akademisi

<i>Outcomes</i>	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
			<ul style="list-style-type: none"> • LSM bidang penanganan bencana • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
Terwujudnya pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan dan efisien	Pengurangan Sampah Semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Pertanahan dan Tata Ruang • Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat • Pelaku Usaha • Akademisi • LSM Bidang Lingkungan Hidup • Organisasi dan Mitra Bidang lingkungan hidup
		Program pengelolaan Persampahan	
		Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan Dunia usaha/swasta sebagai mitra Pengelolaan	Program pengelolaan Persampahan	
	Peningkatan Cakupan pelayanan dan kualitas system	Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	
	Pengelolaan	Program pengelolaan Persampahan	
	Pengembangan kelambagaan, peraturan dan perundang-Undangan	Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	
		Program pengelolaan Persampahan	
	Pengembangan alternatif sumber Pembiayaan	Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional	

<i>Outcomes</i>	Arahan kebijakan	Arahan program	Para pihak
		Program pengelolaan Persampahan	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan, telaahan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, isu strategis nasional tahun 2020-2024, isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dinamika internasional, kebijakan RTRW Kabupaten Sukabumi, dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yaitu: (1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana; (3) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah; (4) Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan (5) Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Secara umum lima isu strategis diuraikan sebagai berikut:

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Struktur penduduk Kabupaten Sukabumi dengan proporsi usia produktif yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya, mengharuskan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Kabupaten Sukabumi mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Proporsi usia produktif hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 65,83 persen, dengan angka ketergantungan usia muda dan usia tua yang rendah. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Sukabumi telah mengalamifase transisi demografi dan puncak dari fase ini terjadi pada rentang tahun 2020-2030 yang lazim dikenal sebagai bonus demografi. Bonus demografi dapat dikatakan sebagai bonus apabila dapat dipenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dan daya saing di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya. Kabupaten Sukabumi masih memiliki tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia biasanya menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, dimana pada tahun 2019 dan 2020 tingkat IPM Kabupaten Sukabumi berada di posisi empat terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

IPM daerah yang belum optimal dipengaruhi oleh masih rendahnya komponen pendidikan dan kesehatan penduduk Kabupaten Sukabumi. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi berada pada posisi terbawah di Jawa Barat pada tahun 2019 dan 2020. Rata-rata penduduk Kabupaten Sukabumi menamatkan sekolahnya hingga kelas satu Sekolah Menengah Pertama. Selain permasalahan pada komponen pendidikan, terdapat permasalahan pada komponen kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Tingginya jumlah Angka Kematian Ibu, menandakan masih rendahnya pelayanan dasar kesehatan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, kesadaran masyarakat Kabupaten Sukabumi terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang masih rendah. Di samping itu, pada tahun 2020 adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, dan salah satunya menyerang sektor kesehatan masyarakat.

Kualitas kesehatan dan pendidikan penduduk Kabupaten Sukabumi yang belum optimal berpengaruh kepada produktivitas, pola hidup masyarakat, kualitas, dan pengambilan keputusan dalam pekerjaan. Terdapat tenaga kerja yang masih memiliki keterampilan yang rendah di setiap sektor lapangan usaha, sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas lapangan usaha tersebut. Pada tahun 2019 tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Sukabumi sebagian besar merupakan lulusan SMA sebanyak 70,64 persen, dan sebanyak 18,24 persen tenaga kerja merupakan lulusan SMP.

Peran pemuda dan olahraga juga menjadi perhatian dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Kreativitas dalam segala bidang dapat menjadi pelopor terbentuknya prestasi dan inovasi. Terdapat beberapa permasalahan terkait peran pemuda dan olahraga yaitu belum optimalnya peran kelembagaan pemuda, minimnya prestasi olahraga baik di kancah nasional maupun internasional, serta sarana prasarana yang kurang memadai untuk pembinaan prestasi olahraga, dan kreativitas pemuda. Tantangan lain yang dihadapi daerah yaitu ketimpangan pembangunan manusia berdasarkan gender, indeks ketimpangan gender Kabupaten Sukabumi masih menunjukkan status ketimpangan yang tinggi. Komponen penyusunnya yaitu partisipasi angkatan kerja perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan pendidikan yang ditempuh antara penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan *gap* nilai yang cukup tinggi.

Dinas pertanian terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya para petani yang tergabung kedalam kelompok tani (Poktan) /gabungan kelompok tani (Gapoktan) melakukan pelatihan dan pendampingan oleh para penyuluh dilapangan. Peningkatan kapasitas petani melalui pendampingan kelembagaan kelompok petani, alih teknologi dan inovasi.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana manusia dalam keadaan makmur, sehat, damai, dan diikuti dengan rasa keselamatan. Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi kesejahteraan pemerataan ekonomi, permasalahan sosial merujuk pada kesejahteraan masyarakat secara sosial, dan ketahanan bencana merujuk pada kesejahteraan masyarakat yang memiliki rasa keselamatan. Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Pada tahun 2016 penduduk miskin Kabupaten Sukabumi mencapai 8,13 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 6,22 persen.

Angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya, dimana angka tersebut sudah melampaui target dan lebih rendah dari angka kemiskinan rata-rata Jawa Barat dan Nasional. Namun, pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan, sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19. Apabila diidentifikasi dari tingkat garis kemiskinan dan pola pengeluaran masyarakat, garis kemiskinan Kabupaten Sukabumi berada di posisi bawah dari rata-rata Jawa Barat. Pola pengeluaran masyarakat menurut kelompok makanan dan bukan makanan, masih didominasi oleh kelompok makanan pokok dengan rasio peningkatan untuk konsumsi makanan lebih besar dibandingkan untuk kelompok bukan makanan. Asumsi terhadap fenomena tersebut adalah apabila pengeluaran konsumsi semakin tinggi untuk non makanan/pangan berupa komoditas sekunder dan/ tersier, maka kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Penentuan garis kemiskinan yang rendah, menyebabkan tingkat kemiskinan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan Kabupaten Sukabumi pada level yang rendah, dan berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Namun, hal tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan

penduduk Kabupaten Sukabumi yang rendah, dengan angka penduduk rentan miskin di Kabupaten Sukabumi yang tinggi. Tingginya angka penduduk rentan miskin dibuktikan dengan tingginya persentase penduduk yang memiliki pengeluaran dengan kategori rendah, mendekati garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan dan masalah sosial merupakan permasalahan yang saling bersinggungan, dan memiliki hubungan sebab akibat. Sumber permasalahan sosial dapat disebabkan oleh bencana social kemasyarakatan dan bencana alam. Bencana sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi diantaranya kasus sosial dan kriminalitas. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh pada tingginya kasus sosial dan kasus kriminalitas. Kasus kriminalitas dengan intensitas permasalahan yang tinggi yaitu diantaranya kasus pembunuhan, pembakaran, penipuan, pencurian dengan kekerasan, pencurian, bunuh diri, lokasi anak jalanan, dan penyandang cacat.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sukabumi secara umum mengalami penurunan dari 1.612.835 orang pada tahun tahun 2019 menjadi 1.558.220 orang pada tahun 2020. Jumlah total PPKS tersebut didominasi oleh fakir miskin yaitu sebanyak 1.469.898 orang pada tahun 2020. Permasalahan PPKS secara umum disebabkan karena masih kurangnya pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pengelolaan *database* penerima bantuan sosial dan pangan yang tidak tepat sasaran, tingginya penyandang disabilitas, tuna sosial, anak dengan kasus hukum, belum optimalnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kasus pernikahan anak, serta belum optimalnya program penciptaan kemandirian ekonomi untuk perempuan dan kesetaraan gender.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di kategorikan sebagai bencana non-alam, yang berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Salah satu upaya untuk mencegah penyebaran pandemi yaitu membatasi interaksi, pembatasan aktivitas sosial, hingga menurunnya aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, akibat terganggunya pola mata pencaharian masyarakat. Hingga pada tahun 2020, tingkat kemiskinan daerah, nasional, dan global mengalami peningkatan dengan menurunnya pendapatan masyarakat.

Sumber permasalahan sosial dapat terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Permasalahan sosial lainnya yang muncul dapat bersumber dari rentannya ketahanan bencana suatu daerah. Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat kerawanan terhadap terjadinya bencana yang tinggi. Kondisi tersebut

menyebabkan tingginya intensitas jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2020, total kejadian bencana mencapai 470 kejadian dengan jumlah korban sebanyak 5.482 jiwa. Jenis bencana yang terjadi diantaranya kekeringan, kebakaran, pergerakan tanah, gempa bumi, angin kencang, banjir, dan longsor. Kondisi tersebut menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Sukabumi agar mampu melakukan tindakan kesiapsiagaan, baik saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah

Salah satu titik tolak pembangunan daerah yaitu dengan mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi mengalami perubahan yang fluktuatif pada rentang tahun 2016 hingga tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi sempat mengalami perlambatan, dan penguatan kembali pada rentang tahun tersebut, namun cenderung stabil hingga tahun 2019. Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian, tercatat sebanyak 14 lapangan usaha mengalami penurunan nilai dan perlambatan pertumbuhan. Kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan, dan jasa perusahaan.

Struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; dan perdagangan. Kontribusi sektor pertanian Kabupaten Sukabumi terhadap perekonomian daerah cenderung mengalami penurunan selama sepuluh tahun terakhir. Secara nilai besarnya selalu meningkat, namun laju pertumbuhan sektor pertanian terus mengalami perubahan yang fluktuatif dan cenderung tidak stabil.

Sektor manufaktur dengan kontribusi yang tinggi yaitu lapangan usaha industri pengolahan yang meningkat setiap tahunnya. Namun, laju pertumbuhan perekonomian dari sektor tersebut tumbuh secara fluktuatif. Sektor industri manufaktur berpotensi paling besar untuk mendorong pembangunan ekonomi, akan tetapi memiliki pertumbuhan yang tidak stabil, dikarenakan belum optimalnya pengembangan kawasan industri, dan masih rendahnya keunggulan yang dimiliki.

Apabila ditinjau dari sektor tersier yaitu sektor jasa salah satunya pariwisata dan jasa keuangan, kontribusi dari sektor tersebut masih sangat rendah bagi perekonomian Kabupaten Sukabumi. Sektor pariwisata Kabupaten Sukabumi yang menjadi salah satu sektor unggulan, masih memiliki kontribusi dan

penerimaan daerah yang rendah. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya promosi dan *branding* pariwisata, serta belum optimalnya pembangunan atraksi destinasi wisata, dan sebagian besar wisatawan yang berkunjung tidak menginap sehingga tidak meningkatkan nilai tambah bagi sektor pendukung pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi dalam sektor primer yaitu nilai tambah dan produktivitas dari pelaku usaha pertanian yang masih rendah, aktivitas ekonomi pertanian dari hulu hingga hilir belum terintegrasi, pelaksanaan pengembangan sektor peternakan dan perikanan yang belum optimal, ketidakpastian cuaca, musim, dan hama, rendahnya regenerasi petani, dan tingginya alih fungsi lahan sehingga menurunnya luas lahan pertanian dan menyebabkan rendahnya penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani. Alih fungsi lahan terjadi dari lahan pertanian dan perkebunan menjadi permukiman, peningkatan infrastruktur, maupun aktivitas penunjang ekonomi lainnya. Hal tersebut dikarenakan lahan pertanian yang tidak dilindungi, sehingga beralih fungsi menjadi peruntukan lain. Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka pemerataan infrastruktur dan ekonomi haruslah memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memiliki tantangan degradasi dan depleksi sumber daya alam, air, dan keanekaragaman hayati. Selain tingginya alih fungsi lahan, permasalahan lingkungan lainnya yaitu belum optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup daerah, luasan Ruang Terbuka Hijau yang kecil, dan jumlah timbulan sampah yang meningkat. Isu alih fungsi lahan turut menyumbang pada penurunan nilai indeks tutupan lahan. Hal tersebut banyak berpengaruh pada penurunan lahan pertanian, pengelolaan sumber daya pangan, dan menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Komponen kualitas lingkungan hidup lainnya yang belum optimal dan belum mencapai target daerah yaitu indeks kualitas air. Selain itu, kualitas udara Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya menghadapi tantangan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, keterbatasan infrastruktur, ketersediaan lahan, penataan ruang, dan kesejahteraan pelaku usaha yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk pemerataan pembangunan, tanpa harus mengganggu ekosistem dan sumber mata pencarian masyarakat. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya secara lestari untuk memproduksi barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas, serta ditunjang dengan daya dukung sumber daya kelembagaan, sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi pendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Fokus utama infrastruktur di Kabupaten Sukabumi yaitu infrastruktur penunjang pelayanan dasar, dan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi. Pembangunan fokus utama infrastruktur tersebut ditopang oleh pelaksanaan transformasi digital, dan ketahanan bencana. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur disusun dan dilaksanakan secara lintas sektor untuk menciptakan pembangunan sarana dan prasarana yang merata.

Infrastruktur pelayanan dasar yaitu sarana dan prasarana penunjang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, permukiman, pekerjaan umum, dan penataan ruang. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan Kabupaten Sukabumi masih mengalami ketimpangan antar wilayah, dan masih rendahnya aksesibilitas atau cakupan luas wilayah pelayanan sekolah dan layanan kesehatan. Semakin tinggi cakupan luas wilayah pelayanan sekolah dan kesehatan, maka semakin rendahnya aksesibilitas masyarakat untuk menjangkau sarana tersebut. Selain itu, masih terdapat sarana dan prasarana yang belum optimal dalam menunjang kegiatan pendidikan yaitu ruang kelas masih dalam kondisi rusak dan tidak layak. Permasalahan sarana dan prasarana yang berpengaruh pada kesehatan yaitu masih belum optimalnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi yang layak.

Belum optimalnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, identik dengan lingkungan atau kawasan tempat tinggal penduduk yang kumuh. Kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi tersebar di beberapa Ibu Kota Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Permasalahan utama kawasan kumuh yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh termasuk pendanaan dan gerakan masyarakat. Hingga saat ini, masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, dan masih terdapat rumah yang tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni tersebar cenderung merata baik di daerah pusat kota maupun daerah yang jauh dari perkotaan.

Jalan penghubung antar wilayah khususnya daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota masih belum optimal, bahkan masih terdapat jalan dengan kondisi rusak berat, dan jembatan dalam kondisi rusak. Sebagian besar jalan sudah

beraspal, namun jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat masih tinggi, dan belum mantapnya pelayanan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan/kawasan perkotaan. Adanya pengelompokan atau pemusatan fasilitas dan kegiatan di kawasan perkotaan, menimbulkan potensi daerah-daerah rawan kemacetan. Masalah lain yang mengakibatkan kemacetan yaitu, belum optimalnya pelayanan dan sistem angkutan umum, simpul jaringan transportasi dan tempat parkir yang belum terkendali, serta rekayasa lalu lintas jalan yang belum optimal.

Pengembangan infrastruktur fasilitas publik dan transportasi belum terintegrasi dengan aspek tata guna lahan dan tata ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur harus merata dan terintegrasi, serta diarahkan untuk mewujudkan konektivitas antar daerah baik secara fisik maupun virtual yang memenuhi layanan dasar bagi masyarakat, dan mendukung aktivitas perekonomian. Infrastruktur pendukung ekonomi merupakan infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian baik sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas sektor pertanian, peternakan, dan kelautan yang mendukung dalam pembangunan ekonomi masih belum optimal. Pembangunan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi masih rendah secara kualitas dan kuantitas. Pemanfaatan jaringan irigasi yang telah ada terkendala oleh rendahnya pemeliharaan kinerja operasional, pemeliharaan sistem irigasi dan tingkat keamanan, sehingga fungsi irigasi mengalami penurunan bahkan mengalami kerusakan. Jaringan irigasi dalam kondisi tidak berfungsi dengan baik mencapai hampir setengah dari jumlah yang ada. Selain itu, terdapat permasalahan dalam kelembagaan P3A, terutama dalam pemahaman terhadap tugas dan fungsi P3A dalam pengelolaan irigasi masih lemah. Kaderisasi anggota P3A masih belum optimal, yang mengurangi daya dukung terhadap era globalisasi dan IT dalam pengelolaan irigasi. Selain itu, belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi (Bappeda, PU, Pertanian, P3A/GP3A) yang disebabkan koordinasi antar lembaga terkait di unsur Komir belum Optimal. Kondisi tersebut tentunya dapat memengaruhi produktivitas pangan daerah, sebagai lumbung padi nasional jika tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

Kawasan prioritas Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), kawasan industri, kawasan perkotaan, dan kawasan wisata yang belum berkembang, dikarenakan rencana pembangunan daerah belum mengacu pada RTRW dan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW. Kegiatan pembangunan baik aktivitas ekonomi dan permukiman cenderung terpusat di daerah yang sudah berkembang, dan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut menyebabkan pembangunan yang tidak merata dan

kurang memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerataan pembangunan infrastruktur perlu adanya dukungan dan koordinasi antar sektor, sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan pusat aktivitas pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan unggulan produk pertanian, kawasan industri, dan kawasan unggulan pariwisata.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Sukabumi berpotensi terhadap terjadinya bencana alam yang tinggi. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, indeks risiko bencana Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam kategori risiko bencana yang tinggi, dan masuk kedalam wilayah zona merah. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur baik pendukung pelayanan dasar, dan penunjang ekonomi yang memperhatikan potensi bencana.

Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan membutuhkan kelembagaan atau tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, agar tercapai perencanaan dan pembangunan yang di cita-citakan. Aparatur pemerintahan memiliki peran yang strategis dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkualitas diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aparatur yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral merupakan prasyarat agar dapat terwujud birokrasi yang berkinerja tinggi. Data evaluasi terhadap reformasi birokrasi Kabupaten Sukabumi menunjukkan nilai akuntabilitas kinerja aparatur Kabupaten Sukabumi meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Evaluasi menunjukkan profesionalitas ASN Kabupaten Sukabumi masih sangat rendah, mencapai 59 poin dari skala 100 poin. Berdasarkan hasil survey terhadap pegawai pemerintahan Kabupaten Sukabumi atas integritas jabatan, menunjukkan kurang dari sepuluh persen pegawai pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memahami kinerja, ukuran, dan kontribusi terhadap organisasi. Hal tersebut menunjukkan, masih rendahnya pengetahuan aparat terhadap indikator keberhasilan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang muncul berkenaan dengan sumber daya aparatur yaitu proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi ASN pada bidang penunjang pemerintahan yang kurang optimal.

Berdasarkan evaluasi reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik Kabupaten Sukabumi menunjukkan pencapaian sebesar 8,93 poin dari bobot sebesar 10,00 poin pada tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan, masih terdapat *gap* antara realitas kondisi layanan dan harapan kualitas pelayanan publik yang harus dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi yang terkait langsung dalam hal pelayanan masyarakat belum optimal, sistem kompensasi kepada penerima layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh.

Permasalahan lainnya yang terjadi yaitu pada bidang kelembagaan dan pelaksanaan regulasi. Beberapa permasalahan tersebut yaitu masih lemahnya pengawasan terhadap penegakan regulasi, kurangnya sinergi antar perangkat daerah dalam penataan, pelaksanaan, dan sinkronisasi regulasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum optimal dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Program yang tidak berjalan dengan optimal disebabkan oleh belum kuatnya regulasi dan rendahnya sinergitas antar sektor dalam mendukung program ataupun kegiatan, rendahnya perhatian terhadap pengembangan dan pelaksanaan program, belum optimalnya pengelolaan keuangan, serta rencana dan penyerapan anggaran yang rendah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengelolaan *database*, dokumen, dan administrasi yang masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Regulasi yang disharmoni dan inkonsisten serta tumpang tindih, karena belum optimalnya koordinasi dan integrasi antar perangkat daerah atau pemangku kebijakan, yang menyebabkan program dan kegiatan belum terlaksana secara optimal. Permasalahan lainnya yaitu, belum optimalnya kualitas pelayanan publik, sarana prasarana penunjang pelayanan, belum optimalnya pengelolaan keuangan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih lebih banyak dilakukan pada tingkat Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal jika dibandingkan dengan tingkat Pemerintah Daerah. Masih belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik daerah salah satunya disebabkan oleh wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi yang luas, sehingga cakupan pelayanan publik pemerintah daerah juga cukup luas. Pemekaran kabupaten menjadi Kabupaten sukabumi dan Kabupaten Sukabumi Utara menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Perkembangan penyebaran Pandemi Covid-19 yang tinggi, mengakibatkan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya

pemulihan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu pemangkasan (*refocusing*) APBD dan berpengaruh pada berkurangnya pendapatan daerah, dan pengurangan belanja, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan karena adanya pemangkasan anggaran untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19. Hal tersebut berpengaruh pada proyeksi pendapatan tahun-tahun selanjutnya. Dengan pendapatan daerah yang menurun, belanja daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan daerah kurang optimal, karena harus mendanai kegiatan-kegiatan rangka pemulihan kesehatan, sosial, dan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan evaluasi APBD Kabupaten Sukabumi terhadap kemampuan keuangan daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan proporsi PAD dalam komponen pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang *fluktuatif*, namun cenderung menurun. Komponen PAD dalam total pendapatan daerah memiliki proporsi yang paling sedikit dibandingkan dengan komponen pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi PAD merupakan salah satu ukuran untuk mengidentifikasi derajat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Menurunnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah, dan tingkat ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Sukabumi terhadap bantuan dana pusat dan/ provinsi semakin tinggi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dari jangka menengah perangkat daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sedangkan sasarannya meningkatnya produksi pertanian meningkatnya produksi pertanian, hal ini merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran *impact* pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Tujuan dan sasaran merupakan buah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih juga dapat menjembatani antara strategi dan arah kebijakan yang diambil selama periode RPJMD yang telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi sarana untuk melaksanakan dan sekaligus sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 memiliki indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound*) untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Dalam jangka panjang sasaran pembangunan daerah keberhasilannya dilihat dari capaian indikator makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dimana keberhasilan maupun kegagalan pencapaiannya ditentukan oleh pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat

sektoral, regional dan nasional, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu kerja sama vertikal pusat ke daerah, serta kerja sama horizontal yang melibatkan perangkat-perangkat daerah yang didukung dengan kerja sama antar para pemangku kepentingan. Indikator Makro Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja Periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026	
TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN										
Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan										
T2 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya produksi pertanian	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) (Persen)	-1,08	2,23	3,30	4,36	5,42	5,49	5,55	5,55
		Meningkatnya produksi pertanian	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	10%

Metodologi yang tergambar pada Gambar 4.1 merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara sasaran-sasaran strategis yang diadaptasi dari metodologi *balanced scorecard* dimana semua sasaran saling terkait untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) perspektif yakni perspektif masyarakat, perspektif internal proses, dan perspektif pengembangan.

- **Perspektif masyarakat**

Sudut pandang ini menjabarkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Di mana sasaran di dalamnya terkait erat terhadap definisi masyarakat sejahtera pada pernyataan visi dan misi.

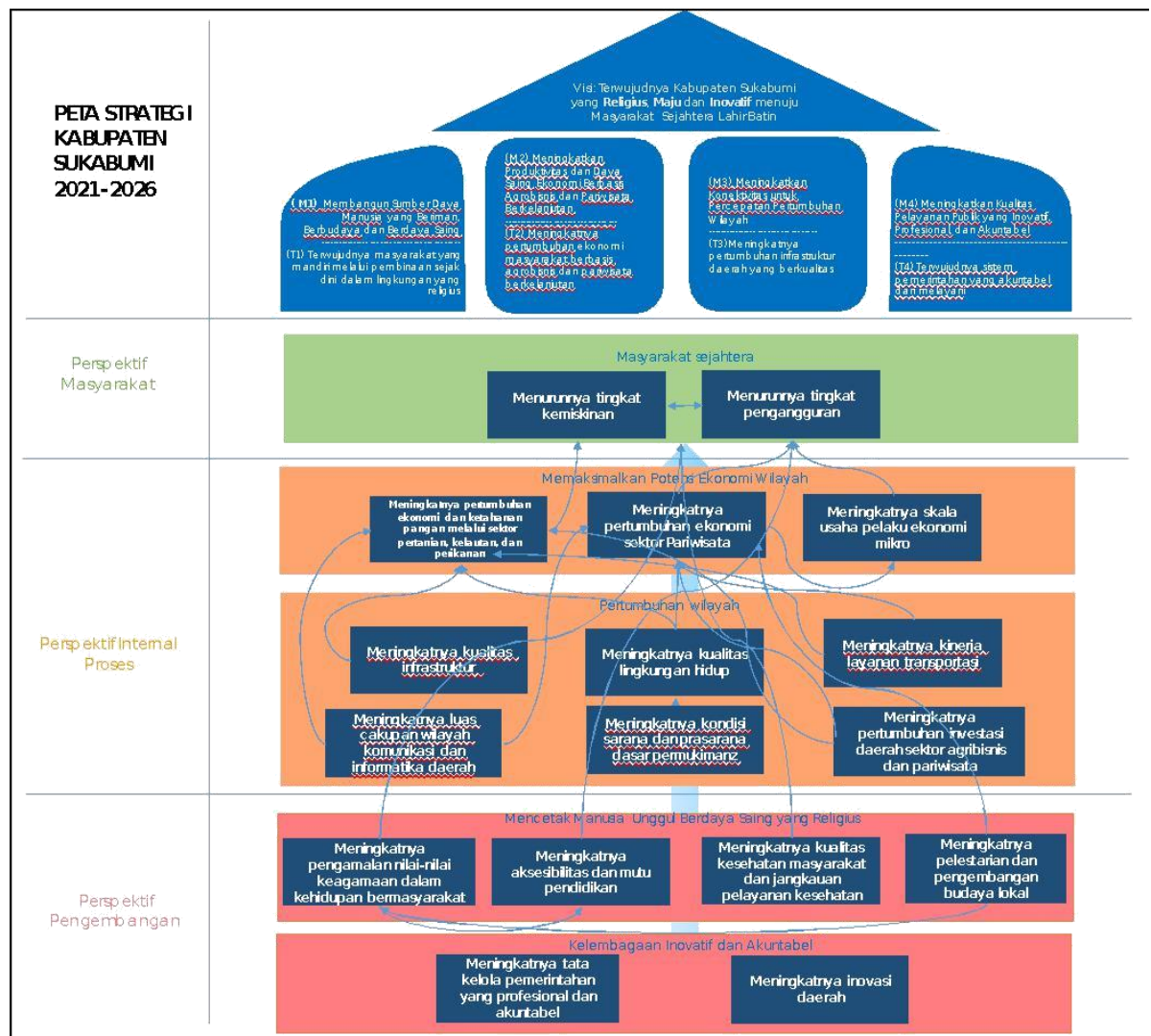
- **Perspektif internal proses**

Sudut pandang ini menjabarkan proses internal yang harus diunggulkan Kabupaten Sukabumi dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana potensi unggul daerah diharapkan digali semaksimal mungkin untuk

kepentingan rakyat melalui perangkat-perangkat daerah dari berbagai sektor yang saling bersinergi.

- Perspektif pengembangan

Sudut pandang ini menjabarkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan. Di mana fokus pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah kesejahteraan yang distimulasi oleh pengembangan lembaga, manusia, dan inovasi, seperti tertuang dalam gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 4.1 Peta Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Jawa Barat 2018-2023, dan sasaran pembangunan RPJMN tahun 2020-2024. Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diidentifikasi bahwa sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi dapat mendukung seluruh sasaran RPJMD Jawa Barat, dan RPJMN. Secara rinci keterkaitan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Keterkaitan sasaran RPJMN, RPJMD Jawa Barat, dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Inklusif	S9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S11	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata
				S7	Menurunnya tingkat Pengangguran
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat Perekonomian	S14	Meningkatnya kualitas Infrastruktur
				S16	Meningkatnya kinerja layanan Transportasi
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan Perikanan

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Jawa Barat		Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi	
	Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera				
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	S5	Menurunnya tingkat Kemiskinan
		S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan Anak	S3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
S5	Meningkatnya perlindungan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S5	Menurunnya tingkat Kemiskinan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 pada Dinas Pertanian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah kebijakan
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan	Ektensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan
			Mengembangkan kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
			Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
			Mencetak agripreneur milenial yang potensial
			Optimalisasi peranan BUMD dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dan perikanan
			Optimalisasi peran swasta dan masyarakat melalui kerjasama pengembangan sektor pertanian, dan perikanan
			Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sektor pertanian dan perikanan
			Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian dan perikanan, yaitu mendorong kemudahan aksesibilitas pembiayaan/permodalan agribisnis bagi para pelaku usaha pertanian dan perikanan
			Mengembangkan skema <i>closed loop</i> dalam peningkatan nilai tambah pertanian
			Optimalisasi sektor swasta pada industri hilir komoditas pangan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 akan difokuskan dalam 6 (enam) prioritas, hal ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rincian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah tersebut adalah :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kebudayaan
- 2) Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial
- 3) Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah**
- 4) Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan
- 5) Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
- 6) Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan di atas menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran pembangunan, sasaran prioritas, tujuan daerah, visi daerah, hingga misi daerah. Prioritas pembangunan yang terkait dengan Dinas pertanian adalah **“Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah”**. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan, dengan proyek prioritas Dinas pertanian Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.2. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, prioritas pembangunan, dengan proyek prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin		
Misi 2 :	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses	Penataan Pasar Tradisional (Pasar Semi Modern)
			Digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan

Tujuan	Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas
agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah	perikanan
			Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi , maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026.

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pertanian. Tugas pokok Dinas Pertanian adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pertanian dan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, meliputi bidang Penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian, Bidang Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian serta Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian , Bidang Penyuluhan Pertanian dan Perizinan Usha pertanian

Strategi dan arah kebijakan Dinas pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri No 050 tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, visi dan misi RPJMD 2021-2026 dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan Dinas pertanian untuk periode renstra 2021-2026 secara rinci tersaji dalam table dibawah ini.

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.	Meningkatnya produksi pertanian	Mengembangkan, mengelola dan mengoptimalkan sarana bidang pertanian	Penggunaan sarana pertanian yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan
		Mengembangkan, mengelola dan mengoptimalkan prasarana bidang pertanian	Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan infrastruktur pertanian
		Meningkatkan pengendalian OPT dan penanggulangan dampak perubahan iklim	Peningkatan pengendalian dan penanggulangan OPT dan dampak perubahan Iklim
		Meningkatkan efektivitas perizinan usaha pertanian	Penerapan izin usaha pertanian yang sesuai aturan perizinan usaha
		Meningkatkan kapasitas ketenagaan penyuluh, penyelenggaraan penyuluhan dan kapasitas kelembagaan petani	Pemberdayaan peran dan fungsi BPP serta efektivitas kelembagaan petani

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah kebijakan dinas pertanian untuk lima tahun ke depan sudah selaras dengan visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 dan mendukung janji politik Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun proyek prioritas yang mendukung janji bupati dan wakil bupati adalah :

1. Pembangunan infrastruktur di lokasi LP2B
2. Digitalisasi pertanian
3. BOP penyuluh
4. Pengembangan kewirausahaan (Program dekranasda)
5. Santripreneur
6. *Life Skill* dan BUMI

Kegiatan lainnya yang Lintas sektor mendukung target prioritas daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan :

1. P2WKSS
2. PKK
3. Stunting
4. Dan kegiatan lainnya yang terkait

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program pembangunan pertanian Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2021 – 2026 akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi serta sesuai misi ke-2 Kabupaten Sukabumi yaitu Meningkatkan produktivitas dan Daya Saing Ekonomi berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan dengan Program prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi sbb :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
4. Program Perizinan Usaha Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian.

Sedangkan indikator program Prioritas (outcome) Dinas Pertanian terdiri dari :

1. Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani
2. Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani
3. Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi
4. Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian
5. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya

Program Kementerian Pertanian yang sesuai dengan RPJMN yang akan dilaksanakan di daerah disesuaikan melalui pendekatan tugas dan fungsi kementerian pertanian yaitu :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian
5. Program Peningkatan Produksi Perkebunan Berkelanjutan

Tabel 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	100%	31,192	100%	35,025	100%	38,000	100%	38,674	100%	39,371	100%	40,274
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	100%	125	100%	230	100%	335	100%	440	100%	545	100%	650
		3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Renja 1 Dokumen, Penyusunan Renja Perubahan 1 Dokumen Penyusunan RKPD 1 Dokumen, Penyusunan Perjanjian Kinerja 2 Dokumen, Sosialisasi di Internal tentang perencanaan 1 kegiatan	100%	25	100%	50								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1	75	1	100	1	125	1	150
		3.27.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA - SKPD 1 Dokumen	100%	15	100%	30								
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1	45	1	60	1	75	1	90
		3.27.01 .2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 Dokumen	100%	15	100%	30								
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1	45	1	60	1	75	1	90
		3.27.01 .2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen DPA - SKPD 1 Dokumen	100%	15	100%	30								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1	45	1	60	1	75	1	90
		3.27.01 .2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan DKA - SKPD 1 Dokumen	100%	15	100%	30								
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1	45	1	60	1	75	1	90
		3.27.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah 1 Dokumen, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perangkat Daerah 1 Dok, laporan Evaluasi RENJA 1 Dok, Laporan Penyelenggaraan	100%	15	100%	30								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Pemerintah Daerah (LPPD) Perangkat Daerah 1 Dok												
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	45	1	60	1	75	1	90	
		3.27.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dinas Pertanian 1 Dok	100%	25	100%	30								
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	35	1	40	1	45	1	50	
		3.27.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	27,007	100%	28,022	100%	29,058	100%	30,024	100%	31,025	100%	32,027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15
		3.27.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji ASN (Bulan)	14	27,000	14	28,000								
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					217	29,035	217	30,000	217	31,000	217	32,000
		3.27.01 .2.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen Renkon 12 Laporan, Jumlah Laporan Neraca 12 Bulan, LRA 12 Bulan	100%	0	100%	5								
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1	5	1	5	1	5	1	5
		3.27.01 .2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen CALK 1 Dokumen	100%	0	100%	5								
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	5	1	5	1	5	1	5
		3.27.01 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Dokuem laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran	100%	7	100%	7								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					_Laporan												
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1	7	1	7	1	7	1	7
		3.27.01 .2.02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen Laporan Prognosis 1 Dokumen	100%	0	100%	5								
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1	6	1	7	1	8	1	10
		3.27.01 .2.03	Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15
		3.27.01 .2.03.0 4	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen laporan BMD 12 Bulan	100%	0	100%	50								
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					1	25	1	25	1	25	1	25
		3.27.01 .2.03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1	25	1	25	1	25	1	25
		3.27.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	10	100%	397	100%	403	1.00	410	100%	410	100%	410
		3.27.01 .2.05.0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Laporan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan	100%	5	100%	10								
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1	15	1	20	1	20	1	20
		3.27.01 .2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 366 Setel	0%	0	100%	237								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					366	240	366	240	366	240	366	240
		3.27.01 .2.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang dididik dan dilatih 50 Orang	0	0	100%	100								
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					50	100	50	100	50	100	50	100
		3.27.01 .2.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi 50 Orang, Jumlah Pegawai yang paham e-kinerja 165 Orang	0	0	100%	50								
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50	50	50	50	50	50	50	50
		3.27.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	455	100%	819	100%	957	100%	1,012	100%	1,062	100%	1,117
		3.27.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik 10 Jenis	100%	20	100%	35								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	45	1	55	1	60	1	65
		3.27.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laptop/Notebook 60 Unit, Printer Epson 52 Buah, layar proyektor 55 unit, mesin penghancur kertas 55 unit, infocus 15 unit, harddisk eksternal 8 unit	100%	20	100%	150								
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	160	1	170	1	180	1	190
		3.27.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Alat kebersihan kantor 25 jenis, alat kebersihan halaman kantor 10 jenis	100%	20	100%	60								
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	65	1	70	1	75	1	80
		3.27.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat Tulis Kantor 10 Jenis; Makan Minum rapat 12	100%	150	100%	250								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Bulan												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1	300	1	315	1	330	1	350	
		3.27.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Cetakan _10Jenis, Penggandaan 20.000 halaman, Penjilidan 10 eksamplar, spanduk 60 m3	100%	25	100%	30								
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1	35	1	40	1	45	1	50	
		3.27.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Surat kabar 12 bulan	100%	20	100%	32								
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1	40	1	50	1	60	1	70	
		3.27.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas 12 Bulan; Rakor ASSET 3 kali	100%	200	100%	250								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	300	1	300	1	300	1	300
		3.27.01 .2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Informasi Digital (Pengelolaan Website) 12 Bulan	100%	0	100%	12								
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	12	1	12	1	12	1	12
		3.27.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	135	100%	600	100%	2,101	100%	1,450	100%	850	100%	900
		3.27.01 .2.07.0 5	Pengadaan Mebel		Mebel kantor 6 jenis	100%	50	100%	200								
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1	200	1	200	1	200	1	200
		3.27.01 .2.07.0 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Peralatan dan mesin kantor (Unit)	100%	65	0%	-								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20	100	20	100	20	100	20	100
		3.27.01 .2.07.0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Baru BPP												
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Lokasi (Geger bitung, Cisaat)	1,301	1 Lokasi (Kebon pedes)	600				
		3.27.01 .2.07.1 1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		AC 60 unit, lemari es 60 unit, papan pengumuman 55 unit, tabung pemadam 55 unit	100%	20	100%	200								
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					150	250	150	250	150	200	150	200
		3.27.01 .2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/ Lapangan		Kendaraan dinas Operasional 1, Motor 4 Unit	100%	0	100%	200								
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					3	250	3	300	3	350	3	400

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15
		3.27.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	2,705	100%	2,850	100%	2,909	100%	3,083	100%	3,209	100%	3,335
		3.27.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai 500 buah	100%	5	100%	6								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	7	1	8	1	9	1	10
		3.27.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Honorarium NonPNS_Bulan	100%	2,000	100%	2,100								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	2,158	1	2,300	1	2,400	1	2,500
		3.27.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Telepon 12 Bulan, penyediaan jasa air 12 Bulan, Penyediaan Jasa listrik 12 bulan, penyediaan jasa internet 12 bulan, Retribusi Pasar 12 Bulan	100%	700	100%	744								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1	744	1	775	1	800	1	825

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					yang Disediakan												
		3.27.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	755	100%	2,057	100%	2,184	100%	2,205	100%	2,220	100%	1,785
		3.27.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		BBM 2.245Liter, Pajak Kendaraan 12 bulan, pemeliharaan mobil dinas jabatan	100%	325	100%	347								
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6	400	6	400	6	400	6	400
		3.27.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan operasional roda empat 6 Unit, roda dua 300 unit	100%	150	100%	250								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					15	250	15	250	15	250	15	250
		3.27.01 .2.09.0 5	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Meja kerja dan meja rapat	100%	25	100%	30								
					Jumlah Mebel yang Dipelihara					30	30	30	35	30	35	30	35
		3.27.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Pemeliharaan peralatan kantor 10 Jenis	100%	25	100%	30								
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10	35	10	40	10	45	10	50
		3.27.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor/Bangunan Lainnya		Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor 11 Jenis	100%	50	100%	100								
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					11	120	11	130	11	140	11	150

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
		3.27.01 .2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan 1 kantor dinas, 7 kantor cabang dinas, 47 kantor BPP,	100%	180	100%	1,300								
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					55	1,350	55	1,350	55	1,350	55	900
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemanfaatan sarana pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang dimanfaatkan oleh petani(%)	100	1,635	100	2,759	100	3,032	100	3,331	100	3,379	100	3,628
			<u>Kegiatan</u>		<u>indikator kegiatan</u>												
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Luas Tanam yang difasilitasi sarana produksi pertanian dan fasilitas alsintan	210	1,535	347	2,309								
					Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan sarana pertanian					1	2,532	1	2,781	1	2,779	1	2,978
			<u>sub kegiatan</u>		<u>indikator sub kegiatan</u>												
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai		Luas Tanam yang difasilitasi sarana produksi pertanian (Ha)	136	750	260	1,235								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
			dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
				Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)					1	1,470	1	1,655	1	1,590	1	1,725	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Fasilitasi Pupuk bersubsidi dan Alsintan (Unit)	74	805	87	1,074									
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)					1	1,062	1	1,126	1	1,189	1	1,253	
			Kegiatan	indikator kegiatan													
			Pengelolaan sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan	Terlaksananya Pengelolaan sumber daya Genetik (SDG) Hewan,	Jumlah Penangkaran Benih/Bibit tanaman Pangan, Hortikultura dan	4	100	12	450								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
			Mikroorganisme Kewenangan kabupaten/Kota	Tumbuhan dan Mikroorganism e Kewenangan kabupaten/Kot a	Perkebunan (Unit)												
					Jumkah dokumen pengelolaan sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan kabupaten/Kota (Dokumen)				1	500	1	550	1	600	1	650	
			Subkegiatan		indikator subkegiatan												
			Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanama n		Jumlah Penangkaran Benih/Bibit tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Unit)	4	100	12	450								
					Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)				1	500	1	550	1	600	1	650	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat pemanfaatan prasarana pertanian yang sediakan dan	Persentase Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan oleh petani (%)	100	3,175	100	48,262	100	44,500	100	45,820	100	46,690	100	47,810

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
			PRASARANA PERTANIAN	dikembangkan													
			Kegiatan		indikator kegiatan	-	-										
			Pengembangan Prasarana pertanian	Tersusunnya laporan pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan (Kec)	24	3,925	20	5,462								
					Jumlah Dokumen pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian (Dokumen)				1	885	1	820	1	590	1	610	
			sub kegiatan		indikator sub kegiatan	-	-										
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Jumlah Lokasi LP2B yang dikelola (kec)	5	200	5	282								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang dikelola (Dokumen)					5	150	5	200	5	150	5	150
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B		Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B	1	75	1	200								
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B (Dokumen)					1	50	1	200	1	50	1	50
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pertanian lainnya (Unit)	18	3,600	20	4,780								
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)					1	635	1	370	1	390	1	410

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		Jumlah Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1	50	1	200								
					Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan					1	50	1	50	0	0	0	0
			Kegiatan		indikator kegiatan	-	-										
			Pembangunan Prasarana pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun (jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, dam parit, irigasi tanah dangkal/dalam, pipanisasi, irigasi perpompaan, rumah produksi/bangsas, bangunan gedung bpp) /Infrastruktur Pendukung LP2B	200	39,250	217	42,800								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian (Laporan)					1	43,615	1	45,000	1	46,100	1	47,200
			sub kegiatan		indikator sub kegiatan	-	-										
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang di bangun/direhab (Unit)	150	30.000	152	30.400								
				Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Unit)					154	30.515	156	31.200	158	31.600	160	32.000	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		Jumlah Embung yang di bangun/direhab (Unit)	15	2,625	16	2,800								
				Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Unit)					17	2,975	18	3,150	19	3,325	20	3,500	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jumlah jalan usaha tani yang di bangun/direhab (Unit)	20	4,000	21	4,200								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)					22	4,400	23	4,600	24	4,800	25	5,000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		Jumlah DAM Parit yang di bangun/direhab (Unit)	15	2,625	16	2,800								
					Jumlah Dam Parit yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)					17	2,975	18	3,150	19	3,325	20	3,500
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage		Jumlah Longstorage yang di bangun/direhab	0	0	1	200								
					Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)					1	200	1	200	1	200	1	200
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		Jumlah Pintu air yang di bangun/direhab	0	0	1	150								
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)					1	150	1	150	1	150	1	150
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh		Jumlah Balai penyuluh di Kecamatan yang di bangun/direhab	0	0	3	1,200								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
			di Kecamatan serta sarana pendukungnya		(Unit)												
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)				3	1,200	3	1,200	3	1,200	3	1,200	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana lainnya yang di bangun/direhab (Unit) : Irigasi Perpompaan, Irigasi Pipanisasi, Kincir Angin	0	0	7	1,050								
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)				8	1,200	9	1,350	10	1,500	11	1,650	
			3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tingkat fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi (%)	0	0	100	430	100	430	100	430	100	430	100	430

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15
			Kegiatan		indikator kegiatan												
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulang an Bencana pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi (Kekeringan, banjir, serangan OPT yang menyebabkan gagal panen/tanam)	0	0	11	430								
					Jumlah dokumen pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana pertanian Kabupaten/Kota					1	430	1	430	1	430	1	430
			sub kegiatan		indikator sub kegiatan	-	-										
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Gerakan Pengendalian OPT (Kali)	0	0	4	100								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)					90	100	90	100	90	100	90	100
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah fasilitasi pengendalian Banjir dan kekeringan (Jenis)	0	0	4	200								
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)					90	200	90	200	90	200	90	200
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah gerakan Pencegahan dan penanganan kebakaran lahan pertanian (Kali)	0	0	1	30								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)					25	30	25	30	25	30	25	30
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Jumlah Fasilitas Pasca Bencana Alam Pertanian (Jenis)	0	0	2	100								
					Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)					1	100	1	100	1	100	1	100

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
			3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat Fasilitasi program perizinan usaha pertanian	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian (%)	100	250	100	250	100	350	100	650	100	250	100	250
			<u>Kegiatan</u>														
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya penerbitan izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi rekomendasi perizinan usaha pertanian	10	250	10	250								
					Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1	350	1	650	1	250	1	250	
			<u>sub kegiatan</u>		<u>indikator sub kegiatan</u>	-	-										
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		Jumlah Standar pelayanan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Jenis)	0	0	2	50								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)					1	100	1	50	1	50	1	50
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Jumlah Penilaian dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian(lokalasi)	0	0	10	50								
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)					1	100	1	450	1	50	1	50
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Usaha pertanian yang dibina dan diawasi	20	250	20	150								
					Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Di awasi (Laporan)					1	150	1	150	1	150	1	150
			3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya program penyuluhan pertanian	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	100	3,722	100	6.623	100	6,975	100	7,327	100	7,679	100	8,036
			<u>Kegiatan</u>		<u>indikator Kegiatan</u>	-	-										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksana program penyuluhan pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian(kec)	47	3,722	47	6,623								
					Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan pertanian					1	6,975	1	7,327	1	7,679	1	8,036
			sub kegiatan		indikator sub kegiatan	-	-										
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa(Kec)	47	1,670	47	3,206								
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)					47	3,461	47	3,716	47	3,971	47	4,231
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan	130	1,570	144	2,200								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)				144	2,250	144	2,300	144	2,350	144	2,400	
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang disediakan(Unit)	47	482	58	917								
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)				58	964	58	1,011	58	1,058	58	1,105	
			Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		- Pembentukan korporasi pertanian (Unit)			2	50								
					Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk (Unit)				2	50	2	50	2	50	2	50	
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		- Penyelenggaraan Sekolah Lapang:	0	0	5	250								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)					5	250	5	250	5	250	5	250
					JUMLAH		79,974		93,348		93,287		96,232		97,799		100,428

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas pertanian Kabupaten Sukabumi mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan tujuan dan sasaran daerah bertujuan untuk memberikan arah tujuan dan sasaran dari visi dan misi perangkat daerah dengan indicator kinerja yang menggambarkan mengenai ukuran keberhasilan pencapaian dari visi dan misi Kepala daerah dan wakil Kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau *indicator* capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Sesuai dengan arahan kebijakan bidang Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi telah menetapkan bidang urusan ke dalam indicator kinerja program yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Indikator Kinerja daerah (IKFD) RPJMD Tahun 2021 – 2026. Indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan produksi pertanian	2	2	2	2	2	2	10

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan pemangku kepentingan Sektor Pertanian di Kabupaten, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pertanian serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Pertanian. Dengan demikian, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi telah mengakomodir semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Renstra menjabarkan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program kepala daerah kabupaten Sukabumi. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indicator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bidang pertanian yang hendak dicapai pada periode 2021-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dalam Menyusun rencana kerja (Renja), Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Pertanian, Laporan SAKIP dan LPPD.

Beberapa kaidah pelaksanaan rencana strategis (renstra) Dinas Pertanian Tahun 2021 – 2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melakukan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Bidang-bidang dan Balai/UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan,

program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pertanian kabupaten Sukabumi wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas pertanian kabupaten Sukabumi, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan atau Daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, diharapkan perencanaan pembangunan bidang pertanian dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga renstra ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.



Sukabumi, Maret 2022

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,

H. TENDY HENDRAYANA, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19620711 198503 1 010